

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu)

Penulis:

Rizky Ramadhan¹
Uni Fahrani²

Afiliasi:

Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi YAPIS
Dompu^{1, 2}

Korespondensi:

rizkyramadhandompu@g
mail.com

Histori Naskah:

Submit: 22-02-2024
Accepted: 27-02-2024
Published: 01-03-2024

Abstrak:

Tahun Anggaran 2017-2021 BPK telah menerbitkan LKPD Kab. Dompu dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun BPK R mengungkapkan masih terdapat temuan atau catatan-catatan pemeriksaan sehingga perlu dilakukan analisis dan penelitian lebih lanjut guna meminimalisir kendala-kendala serupa pada laporan keuangan tahun-tahun selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan SAP, SAKD dan SIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kabupaten Dompu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dari sisi pengumpulan data penelitian ini disebut sebagai penelitian survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala dan staf/karyawan BPKAD Kabupaten Dompu yang berjumlah 91 orang. Pendekatan yang digunakan dalam penarikan sampel adalah dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 52 orang. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS Versi 25. SAP secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, SAKD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, SPI secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Secara simultan variabel SAP, SAKD, dan SIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu memiliki pengaruh sebesar 65% dan selebihnya 35% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pendahuluan

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Pujanira dan Taman, 2017). Peraturan Pemerintahan No 71 Tahun 2010 mengatakan kualitas karakteristik suatu laporan keuangan pemerintah yaitu suatu prasyarat normatif yang sangat dibutuhkan sehingga laporan keuangan pemerintahan bias memberikan kualitas yang diinginkan, yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam proses mengelola keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi haruslah disusun dengan semaksimal mungkin agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif (Ikyarti dan Aprilia, 2019).

Walaupun mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi NTB di Mataram terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dompu tahun anggaran 2021 yang diterima pada tanggal 10 Mei 2022, diungkapkan masih terdapat temuan atau catatan-catatan pemeriksaan, diantaranya BPK menemukan adanya permasalahan-permasalahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam penyusunan Laporan



Kuangan, Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu belum sepenuhnya berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. (Setda Kabupaten Dompu, 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu walaupun telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih mengalami kendala-kendala dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas, sehingga perlu dilakukan analisis dan penelitian lebih lanjut guna meminimalisir kendala-kendala serupa pada laporan keuangan pada tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan pengembangan penelitian dari penelitian sebelumnya dan guna menganalisis lebih lanjut pengaruh ketiga unsur tersebut, yakni standar akuntansi pemerintahan (SAP), sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), dan sistem pengendalian internal (SPI), dengan judul penelitian **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

Studi Literatur

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori *Stewardship* yang dikemukakan oleh (Donaldson & Davis, 1991) mengasumsikan bahwa terdapat hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi didukung dengan adanya berbagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, berdasarkan asas kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang memiliki wewenang dalam suatu organisasi, dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dikerjakan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporannya. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, dengan menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu dalam menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyampaikan kegiatan bisnis dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan sebuah perusahaan sering diaudit lembaga tertentu untuk memastikan keakuratan laporan, terutama urusan pajak, pembiayaan, atau investasi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Standar Akuntansi Pemerintah, 2010). Untuk kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, terkait SAP pada Pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam membuat dan melakukan penyusunan dan laporan keuangannya yang disajikan untuk pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah (PSAP) adalah penggunaan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (Ardianto dan Eforis, 2019).

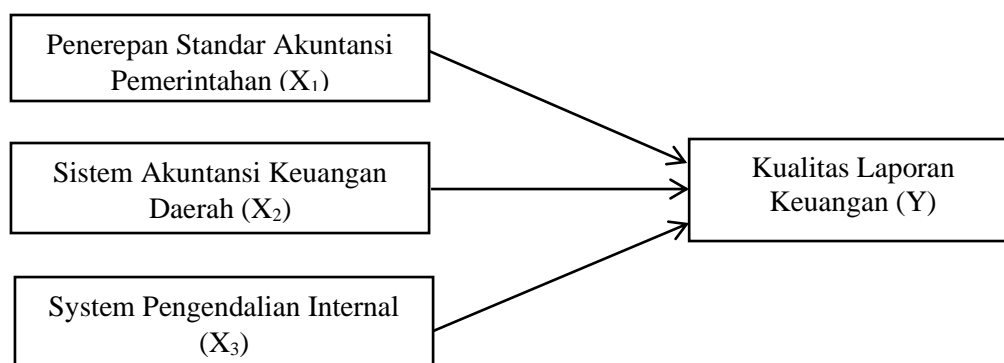
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut: "Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB)".

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem pengendalian intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kerangka Berpikir



Metode Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer yaitu dengan melakukan observasi awal terhadap objek penelitian, melakukan wawancara, dan penyebaran kuesioner. Jenis angket dalam penelitian yaitu angket tertutup, di mana responden hanya member jawaban sesuai dengan apa yang sudah disediakan oleh peneliti, alternatif jawaban sudah tersedia.

Populasi, sampel, teknik pengambilan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala dan staf/karyawan BPKAD Kabupaten Dompu yang berjumlah 91 orang. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang akan penulis gunakan yaitu didasarkan pada metode *Non Probability Sampling*, Pendekatan yang digunakan dalam penarikan sampel adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu Unsur Pemimpin dan Staf yang bekerja di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Unsur Pemimpin dan Staf yang berpendidikan minimal S1 yang mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun. Sehingga jumlah populasi yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 52 orang.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data adalah sebagai berikut:

Statistik Deskriptif Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif lebih berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta panyajian hasil peringkasan tersebut

Uji Keabsahan Data**Uji Validitas**

Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut:

- Jika r hitung positif dan r hitung $> r$ table maka butir pertanyaan tersebut valid.
- Jika r hitung negatif dan r hitung $< r$ table maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

Uji Reliabilitas

Teknik pengukuran reliabilitas menggunakan teknik *alpha cronbach* untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak, bila jawaban yang diberikan responden berbentuk skala. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas 0,60.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan (Ghozali, 2018;161). Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov Sminorv test* (1-Sampel K-S) dengan pendekatan Asympetic. Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikansi 0,05.

Uji Multikolinearitas

Uji mutikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018;107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Ujimultikolinieritas dapat dilakukan dengan mengacu pada *Variance Inflation Factory* (VIF) dimana nilai <10 dan nilai *tolerance* tidakkurang dari 0,1.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan Jika varians dari residual satu pengamatan berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018;137). Uji Heteroskedastisitas menggunakan teknik uji Glejser. Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan tingkat signifikan 5%. Apabila nilai signifikansinya $>0,05$, maka tidak terjadiheteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas X_1, X_2, \dots, X_1 terhadap suatu variabel terikat Y). Model analisis linear berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas laporan keuangan

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan(X_1)

β_2 = Koefisien regresi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)

β_3 = Koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal (X_3)

X_1 = Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

X_2 = Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X_3 = Variabel Sistem Pengendalian Internal

e = Standart Error



Uji Hipotesis Penelitian

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel independen, Ghozali (2018;97). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted* (R^2) pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Nilai *Adjusted* (R^2) dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model Ghozali (2018;97).

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau joint mempengaruhi variabel independen, (Ghozali, 2018;179). Uji statistik F adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau: $H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$

Uji T

Uji statistik t adalah uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau: $H_0 : b_i = 0$. Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$H_a : b_i \neq 0$

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X₁	52	51	85	73.34	10.629
X₂	52	35	50	44.34	5.342
X₃	52	42	60	54.03	6.364
Y	52	28	40	36.40	4.211
Valid N(listwise)	52				

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS Versi 25 (2023)

Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) memiliki nilai mean 73,34. Untuk nilai standar deviasi memiliki nilai 10,629 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada nilai mean, maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran data untuk variabel independen Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) telah disebarkan secara merata kepada seluruh responden.

Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) memiliki nilai mean 44,34. Untuk nilai standar deviasi memiliki nilai 5,342 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada nilai mean, maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran data untuk variabel independen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah telah disebarkan secara merata kepada seluruh responden.

Variabel Sistem Pengendalian Internal (X_3) memiliki nilai mean 54,03. Untuk nilai standar deviasi memiliki nilai 6,364 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada nilai mean, maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran data untuk variabel independen Sistem Pengendalian Internal telah disebarkan secara merata kepada seluruh responden.

Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) memiliki nilai mean 36,40. Untuk nilai standar deviasi memiliki nilai 4,211 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada nilai mean, maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran data untuk variabel independen Kualitas Laporan Keuangan telah disebarakan secara merata kepada seluruh responden.

Uji Keabsahan Data

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel X₁ (Standar Akuntansi Pemerintahan)

Nomor Butir Pernyataan	<i>r_{hitung}</i>	<i>r_{tabel}</i>	Keterangan
X1.1	0,438	0,2732	Valid
X1.2	0,861	0,2732	Valid
X1.3	0,975	0,2732	Valid
X1.4	0,935	0,2732	Valid
X1.5	0,943	0,2732	Valid
X1.6	0,969	0,2732	Valid
X1.7	0,899	0,2732	Valid
X1.8	0,932	0,2732	Valid
X1.9	0,845	0,2732	Valid
X1.10	0,931	0,2732	Valid
X1.11	0,862	0,2732	Valid
X1.12	0,957	0,2732	Valid
X1.13	0,919	0,2732	Valid
X1.14	0,933	0,2732	Valid
X1.15	0,959	0,2732	Valid
X1.16	0,934	0,2732	Valid
X1.17	0,946	0,2732	Valid

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 17 item pernyataan variabel X₁ (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang dinyatakan valid, dimana *r_{hitung}* masing-masing item lebih besar dari *r_{tabel}* yaitu 0,2732. Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa *r_{hitung}* > *r_{tabel}* yang membuktikan bahwa data tersebut valid.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel X₂ (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

NomorButir Pernyataan	<i>r_{hitung}</i>	<i>r_{tabel}</i>	Keterangan
X _{2.1}	0,875	0,2732	Valid
X _{2.2}	0,919	0,2732	Valid
X _{2.3}	0,932	0,2732	Valid
X _{2.4}	0,943	0,2732	Valid
X _{2.5}	0,964	0,2732	Valid
X _{2.6}	0,778	0,2732	Valid
X _{2.7}	0,889	0,2732	Valid
X _{2.8}	0,571	0,2732	Valid
X _{2.9}	0,578	0,2732	Valid
X _{2.10}	0,872	0,2732	Valid

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS Versi 25 (2023)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 item pernyataan variabel X₂ (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) yang dinyatakan valid, dimana *r_{hitung}* masing-masing item lebih besar dari *r_{tabel}* yaitu 0,2732. Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa *r_{hitung}* > *r_{tabel}* yang membuktikan bahwa data tersebut valid

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel X₃ (Sistem Pengendalian Internal)

Nomor Butir Pernyataan	<i>r_{hitung}</i>	<i>r_{tabel}</i>	Keterangan
X3.1	0,645	0,2732	Valid
X3.2	0,969	0,2732	Valid
X3.3	0,902	0,2732	Valid
X3.4	0,761	0,2732	Valid
X3.5	0,970	0,2732	Valid
X3.6	0,911	0,2732	Valid
X3.7	0,927	0,2732	Valid
X3.8	0,947	0,2732	Valid
X3.9	0,933	0,2732	Valid
X3.10	0,650	0,2732	Valid
X3.11	0,841	0,2732	Valid
X3.12	0,841	0,2732	Valid

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS Versi 25 (2023)

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 12 item pernyataan variabel X3 (Sistem Pengendalian Internal) yang dinyatakan valid, dimana r_{hitung} masing-masing item lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,2732. Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ yang membuktikan bahwa data tersebut valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kualias Laporan Keuangan)

Nomor Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Y.1	0,904	0,2732	Valid
Y.2	0,923	0,2732	Valid
Y.3	0,917	0,2732	Valid
Y.4	0,664	0,2732	Valid
Y.5	0,929	0,2732	Valid
Y.6	0,937	0,2732	Valid
Y.7	0,878	0,2732	Valid
Y.8	0,807	0,2732	Valid

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 8item pernyataan variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan) yang dinyatakan valid, dimana r_{hitung} masing-masing item lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,2732. Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ yang membuktikan bahwa data tersebut valid.

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliability Statistics		Keterangan
	Cronbach's Alpha	N of Items	
X ₁	0,986	17	Reliabel
X ₂	0,954	10	Reliabel
X ₃	0,967	12	Reliabel
Y	0,953	8	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS Versi 25 (2023)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel X₁ memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,986 > 0,60, untuk variabel X₂ memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,954 > 0,60, dan untuk variabel X₃ memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,967 > 0,60. Sedangkan variabel Y memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,953 > 0,60. Berdasarkan data tersebut nilai *Cronbach Alpha* (α) seluruh variabel penelitian berada diatas 0,60 dan nilai *Cronbach Alpha* (α) variabel penelitian tidak berada dibawah 0,60 oleh karena itu, makavariabel penelitian dikatakan *reliable*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 7 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.41667714
Most Extreme Differences	Absolute	.144
	Positive	.144
	Negative	-.135
Test Statistic		.144
Asymp. Sig. (2-tailed)		.009 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.209
Point Probability		.000
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS Versi 25 (2023)

Berdasarkan tabel diatas, Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov Sminorv test* (1- Sampel K- S) dengan pendekatan *Asympetic* sebesar $0,009 < 0,05$. Berdasarkan data tersebut, maka data penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Namun peneliti mengatasi hal tersebut dengan endektan *Exact* , dimana nilai Sig. Sebesar $0,209 > 0,05$ sehingga data dapat terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Berikut tabel uji multikolinieritas dari penelitian ini:

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	0,370	2,700
	X2	0,187	5,333
	X3	0,243	4,116

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS Versi 25 (2023)

Dari hasil output pada uji multikolinearitas ini, didapatkan *tolerance* untuk masing-masing variabel >0,1 dan uji dan nilai *Variance Inflation Factory* (VIF) untuk masing-masing <10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Sehingga penelitian ini dapat untuk diteliti lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menggunakan teknik uji Glejser pada Tabel 9. Berikut Tabel uji heteroskedastisitas dari penelitian ini:

Tabel 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.029	1.519		4.628	.000
	X ₁	-.138	.027	-.865	-5.129	.000
	X ₂	-.055	.074	-.177	-.747	.458
	X ₃	.135	.056	.504	2.421	.019

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS Versi 25 (2023)

Berdasarkan tabel Heteroskedastisitas diatas dapat dilihat bahwa pada variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas dimana nilai Sig 0,000<0,05, sedangkan pada variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂) tidak terjadi gejala Heterokedastisitas dimana nilai Sig 0,458>0,05, namun pada Variabel Sistem Pengendalian Internal (X₃) nilai Sig sebesar 0,019<0,05 ini menandakan bahwa pada Variabel X₃ mengalami gejala Heterokedastisitas.

Adapun untuk mengatasi gejala Heterokedastisitas pada penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan Metode Spearman's Rho. Adapun hasil uji menggunakan Metode Spearman's Rho yaitu sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas Metode Spearman's Rho

Variabel	Sig	Absolut Residual	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintahan (X ₁)	0,881	0,05	Tidak Terjadi Gejala Heterokedastisitas
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₂)	0,767	0,05	Tidak Terjadi Gejala Heterokedastisitas
Sistem Pengendalian Internal (X ₃)	0,907	0,05	Tidak Terjadi Gejala Heterokedastisitas

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS Versi 23 (2023)

Dari semua variabel diatas tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, dimana jumlah sig untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) sebesar 0,881 > 0,05, variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂) sebesar 0,767 > 0,05 dan variabel Sistem Pengendalian Internal (X₃) sebesar 0,907 > 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 10. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.233	3.036		3.042	.004
	X ₁	.171	.054	.433	3.178	.003
	X ₂	.367	.148	.474	2.478	.017
	X ₃	-.031	.111	-.047	-.279	.781

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS Versi 25 (2023)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 9,233 + 0,171X_1 + 0,367X_2 - 0,031X_3 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

Persamaan regresi linear diatas mempunyai nilai konstanta (positif) sebesar 9,233. Tanda positif menunjukkan pengaruh yang searah antar variabel- variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂) dan Sistem Pengendalian Internal (X₃) dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan jika semua variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂) dan Sistem Pengendalian Internal (X₃) bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan maka nilai Kualitas Laporan Keuangan adalah 9,233.

Koefisien regresi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) sebesar 0,171 (positif), menyatakan bahwa setiap terjadinya kenaikan Standar Akuntansi Pemerintahan 1% maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,171 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Koefisien regresi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂) sebesar 0,367 (positif), menyatakan bahwa setiap terjadinya kenaikan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂) 1% maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,367 satuan dengan asumsi

variabelindependen lainnya konstan.

Koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal (X_3) sebesar -0,031 (negatif), menyatakan bahwa setiap terjadinya penurunan Sistem Pengendalian Internal (X_3) 1% maka akan menurunkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -0,031 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

Uji Hipotesis Penelitian

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of theEstima
1	.819 ^a	.671	.650	2.491
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS 25 (2023)

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,650 sehingga dapat dihitung persentase kontribusi kapasitas Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan yaitu $0,650 \times 100\% = 65\%$. Adapun sisanya 35% mendapat pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel lain misalnya Sumberdaya Daya Manusia, Teknologi Informasi dan lain-lain.

Uji F (*F test*)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau bergabung mempengaruhi variabel independen. Berikut tabel hasil uji F:

Tabel 12. Hasil Uji F (*F test*)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	606.662	3	202.221	32.588	.000 ^b
	Residual	297.857	48	6.205		
	Total	904.519	51			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X ₃ , X ₁ , X ₂						

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS Versi 25 (2023)

Pada tabel 12 di atas menunjukkan hasil Uji F. Nilai signifikansi yang diperoleh yaitu $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi secara simultan dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Uji t (*t-test*)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan. Hasil perhitungan tabel uji t dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Hasil Uji t (t-test)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.233	3.036		3.042	.004
	X ₁	.171	.054	.433	3.178	.003
	X ₂	.367	.148	.474	2.478	.017
	X ₃	-.031	.111	-.047	-.279	.781

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS Versi 25 (2023)

Berdasarkan tabel di atas dengan nilai signifikan sebesar 0,05 dapat diketahui: bahwa:

1. Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) memiliki nilai thitung sebesar 3,178 > t_{tabel} 1,676 dengan nilai signifikansi 0,003 < 0,05 Oleh karena itu maka hipotesis pertama (H₁) diterima artinya secara signifikan ada pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dompus.
2. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,478 > t_{tabel} 1,676 dengan nilai signifikansi 0,017 < 0,05 Oleh karena itu maka hipotesis kedua (H₂) diterima artinya secara signifikan ada pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada BPKAD Kab. Dompus.
3. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X₃) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,279 < t_{tabel} 1,676 dengan nilai signifikansi 0,781 > 0,05 Oleh karena itu maka hipotesis ketiga (H₃) ditolak artinya secara signifikan tidak ada pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X₃) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada BPKAD Kab. Dompus.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis pertama (H₁) dapat diketahui bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hal ini dibuktikan, dengan nilai thitung sebesar 3,178 > t_{tabel} 1,676 dengan nilai signifikansi 0,003 < 0,05 Oleh karena itu maka hipotesis pertama (H₁) diterima artinya secara signifikan ada pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada BPKAD Kab. Dompus. Artinya pemerintah Kabupaten Dompus, telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku.

Dalam laporan keuangan, pemerintah bertindak seperti steward dalam teori stewardship mempunyai kewajiban memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah maka akan bisa mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan keinginan prinsipal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti, Made, dan Setiyowati (2020), Mahardini dan Miranti (2018), Pujanira dan Taman (2017), Sako dan Lantowa (2018) serta Jati (2019) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri, Inapty dan Martiningsih (2015), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan standar akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis kedua (H_2) dapat diketahui bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hal ini dibuktikan, dengan nilai thitung sebesar $2,478 > t_{tabel} 1,676$ dengan nilai signifikansi $0,017 < 0,05$ Oleh karena itu maka hipotesis kedua (H_2) diterima artinya secara signifikan ada pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada BPKAD Kab. Dompus. Ini membuktikan bahwa dengan bekerja dengan mengikuti prosedur-prosedur pencatatan yang baik dan sesuai undang-undang dapat memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan baik.

Suatu sistem yang berkualitas dirancang untuk memudahkan kinerja kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaporan keuangan. Suatu sistem akan berkualitas bila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu sistem yang digunakan dalam pemerintah tersebut adalah sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan. Semakin baik pemerintah mengelola sistem pelaporan keuangan ini maka nilai akuntabilitasnya juga akan semakin meningkat. Hasil tersebut mendukung teori *stewardship* di mana pemerintah daerah sebagai *steward* (pengelola) prinsip-prinsip akuntabilitas. Di mana sistem akuntansi dibuat dan dirancang untuk memudahkan proses pencatatan hingga pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Alamsyah, Rahayuda dan Muslih (2017) dan Pujanira dan Taman (2017) serta Husna, Maryam dan Ikhbar (2022) menunjukkan bahwa secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2017) dan Indrayani dan Widiastuti (2020) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis ketiga (H_3) dapat diketahui yaitu tidak adanya pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hal ini dibuktikan, dengan nilai thitung sebesar $-0,279 < t_{tabel} 1,676$ dengan nilai signifikansi $0,781 > 0,05$ Oleh karena itu maka hipotesis ketiga (H_3) ditolak artinya secara signifikan tidak ada pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada BPKAD Kabupaten Dompus. Sistem pengendalian internal meruakan kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh BPKAD dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan menjamin tersedianya informasi akuntansi pemerintahan yang akurat sehingga dapat dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh unsur pemimpin dan staf BPKAD Kabupaten Dompus. Kemungkinan hal ini terjadi, dikarenakan unsur pemimpin yang ada pada BPKAD Kabupaten Dompus masih kurang menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai, pimpinan masih kurang mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau perilaku pegawai, pemimpin kurang dalam melakukan perencanaan pengelolaan dalam mengurangi resiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi, staf BPKAD masih kurang dalam memahami tujuan dari kegiatan pengendalian, serta unsur pemimpin dan staf yang ada di BPKAD masih kurang dalam mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan BPK pada tahun Anggaran 2021 menemukan adanya permasalahan-permasalahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam penyusunan Laporan Keuangan serta dalam tahun anggaran 2022 adanya temuan oleh BPK bahwa pengelolaan Asset yang belum dilakukan secara tertib.

Hal tersebut bertolak belakang dengan teori *stewardship*, dijelaskan bahwa sifat individu dapat bertanggung jawab untuk pihak lainnya, dapat dipercaya, serta memiliki integritas. Sistem pengendalian internal pemerintah dimana pemerintah bertanggung jawab memonitor aktivitas yang dilakukan dan akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas, oleh karena itu pemerintah melakukan sistem pengendalian internal dengan

cara mengontrol semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sehingga menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang di tunjukkan oleh Wulandari, Mahmud dan Ramadhan (2021), Latifah (2017), Fikri, Inapty dan Martiningsih (2015), Dewi, Mendra dan Saitri (2022), serta Hasanah dan Siregar (2021) menyatakan bahwa Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Safridha (2020), Ikyarti dan Aprila (2019), dan Rahmawati, Mustika dan Eka (2018) serta Indrayani dan Widiastuti (2020) menyatakan bahwa Sistem pengendalian internal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis keempat (H_4) dapat diketahui bahwa hasil Uji F. Nilai signifikansi yang diperoleh yaitu $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi secara simultan dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan dengan teori penatalayanan (*Stewardship theory*) yakni peran pemerintah sebagai agen yang dituntut agar selalu mengedepankan tujuan organisasi, yaitu dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, melakukan prosedur sistem akuntansi keuangan daerah dan melakukan pengendalian internal sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Yanti, Made, dan Setiyowati (2020), Mahardini dan Miranti (2018), Pujanira dan Taman (2017), Sako dan Lantowa (2018) serta Jati (2019) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.. Penelitian ini juga di dukung oleh Suprihatin dan Ananthi (2019) dan Philadelphia, Suryaningsum, dan Suriyono (2020) dan Edriani (2017) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Alamsyah, Rahayu dan Muslih (2017) dan Pujanira dan Taman (2017) serta Husna, Maryam dan Ikhbar (2022) menunjukkan bahwa secara simultan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian oleh Alamsyah, Rahayu dan Muslih (2017), Siahaan dan Simanjuntak (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kabupaten Dompus, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau Hipotesis pertama (H_1) diterima.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau Hipotesis kedua (H_2) diterima.
3. Sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau Hipotesis ketiga (H_3) ditolak.
4. Secara simultan variabel standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu memiliki pengaruh sebesar 65% dan selebihnya 35% dipengaruhi oleh variabel lain diluar tiga variable tersebut.

Referensi

- Adnan, M. A., Arifuddin, A., & Haliah, H. (2017). Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan Kapasitas Individu sebagai Variabel Moderasi. *Patria Artha Journal of Accounting & Financial Reporting*, 1(2), 135-146.
- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95-136.
- Arza, O., Syafitri, Y., & Meyla, D. N. (2021). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Padang panjang. *Pareso Jurnal*, 3(3), 519-542.
- Adhitama, S. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Alamsyah, M. R., Rahayu, S., & Muslih, M. (2017). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kineja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok). *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 15(2).
- Abdul Hafiz Tanjung. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua untuk SKPD. Bandung: Alfabeta.
- Anshari, F. (2022). Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Dompu. Dompu.
- BPKAD. (2023). BPKAD Kabupaten Dompu.
- Daniri, M. A. (2005). Good corporate governance: konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia. Ray Indonesia.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Dewi, N. P. R. F., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2022). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG.
- Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1), 387-399.
- Edriani, D. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Sekretaris Dewan Kota Padang. *UNES Journal Of Social and Economics research*, 2(1), 31-41.
- Fikri, M. A., Inapty, B. A., & Martiningsih, S. P. (2015). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating (Studi empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). *Simposium Nasional Akuntansi*, 18, 5- 76.
- Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. *Land Journal*, 1(1), 1-15.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25(9th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasanah, S., & Siregar, T. R. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *JAKPI-Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(1), 39-47.

<http://www.koranlensapos.com/2018/05/empat-kali-raih-wtp-bupati-dompuatensi.html>.

Diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.

<https://setda.dompukab.go.id/pemda-dompu-sampaikan-raperdapertanggungjawab>

pertanggungjawaban-apbd-tahun-2021-dalam-sidang-paripurna-dprd.html. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.

<https://www.suarantb.com/2020/06/16/apbd-dompu-surplus-rp169-miliar/>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2022.

Husna, A., Maryam, M., & Ikhbar, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 206-214.

Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1-16.

Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131-140.

Jati, B. P. (2019). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 22(1), 1-14.

Latifah, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Bantul). *Prodi Akuntansi*.

Lutfiyanti, A.R. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Subang). Skripsi. Universitas Pasundan Bandung.

Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 22-32.

Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).

Mursyidi. 2013. Analisis Laporan Keuangan Daerah. Bandung: PT Refika Aditama.

Nopianti, M. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada SKPD Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (sakd), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada skpd kota depok)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Nurachman, D. A., & Zeyn, E. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei pada DPKAD*

- dan Inspektorat Kota Bandung*) (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 14-28.
- Philadelphina, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17-35.
- Pemerintah Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Republik Indonesia
- Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah: Republik Indonesia
- Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah: Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*: Republik Indonesia
- Pemerintah Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Republik Indonesia
- Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Republik Indonesia
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D*. Alfabeta. Bandung.
- Sako, U., & Lantowa, F. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 43-54.
- Sanjaya, A., Rasuli, M., & Haryani, E. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Skpd Ka)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH, PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara). *Jurnal manajemen*, 1(2), 129-138.
- Suprihatin, N. S., & Ananthi, A. A. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 242-252.
- Sudiarianti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., & Budiasih, I. G. A. (2015). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Simposium Nasional Akuntansi XVIII.

Wulandari, A., Mahmud, M., & Ramadhan, M. S. (2021). Analisis Determinan yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BPKAD Kabupaten Dompu). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 989-998.

